

**-TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DALAM
MENGGERAKKAN KEBIJAKAN KEPALA DESA
(STUDI DI DESA BIHA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN
PESISIR BARAT)**



**Disusun Oleh :
FITRI APRI YANTI
NPM.1421020133**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai penanggungjawab utama dibidang pembangunan dibantu oleh LPMD. LPMD mengemban fungsi sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan di desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Dan dalam pengelolaan keuangan desa hendaklah didasari pada asas-asas yaitu Partisipatif, Tansparan dan Akuntabel.

Namun permasalahan di Desa Biha setelah diamati dalam pengelolaan keuangan desa tidak memenuhi asas-asas salah satunya transparan. Suatu desa mempunyai Lembaga Kemasyarakatan salah satunya LPMD sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan, membantu tugas dan kewajiban Kepala Desa. Dengan adanya LPMD seharusnya kegiatan pembangunan desa disetarakan untuk semua dusun, namun di Desa Biha hanya difokuskan pada satu dusun, sehingga timbul rasa cemburu sosial dalam masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menggerakkan kebijakan kepala desa dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menggerakkan kebijakan kepala desa dan untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam fiqh siyasah.

Penelitian menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analisis dan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dengan cara analisis kualitatif yaitu menggunakan teknik berpikir.

Salah satu fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Pelaksana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat Desa. Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan, pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Fitri Apri Yanti

NPM : 1421020133

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam
Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Buha
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Susiadi AS,M.Sos.i
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Hj.Nurnazli,S.Ag.,S.H.,M.H
NIP.197111061998032005

Ketua Jurusan

Drs. Susiadi AS,M.Sos.i
NIP. 19580817199303100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Disusun oleh Fitri Apri Yanti, NPM. 1421020133, Jurusan Siyasah Syar'iyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah pada hari Senin, 9 Juli 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Marwin,S.H.,M.H.

(.....)

Sekretaris : M. Irfan,S.H.I.,M.Sy.

(.....)

Penguji I : Drs. Maimun,S.H.,M.A.

(.....)

Penguji II : Drs. Susiadi AS,M.Sos.I

(.....)

Dekan

Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19700901.199703.1.1002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa : 58)¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.113.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayahhanda Lekat Umar dan Ibunda Rohayani yang telah memberikan dorongan, dukungan dan kasih sayang serta do'a yang tiada terputus.
2. Kakek dan nenekku yang telah mendoakan agar pendidikanku terselesaikan.
3. Adik tercinta Taufik Wandra, Ahmad Ihsan, dan Zahwa Sakila Umar yang selalu menjadi inspirasi meraih kesuksesan.
4. Pamanku Fentri Jaya yang selalu menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kakak sepupuku Shopiyanti yang mendoakanku dan menyemangatiku agar skripsi ini terselesaikan.

RIWAYAT HIDUP

Fitri Apri Yanti, dilahirkan di Biha pada tanggal 19 april 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Lekat Umar dan Ibu Rohayani.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Biha selesai tahun 2007. Madrasah Tsanawiyah Mardhatillah Pelita Sari Krui selesai tahun 2011. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Tengah Krui selesai tahun 2014. Tahun 2014 masuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Jurusan Siyasa Syar'iyah, Fakultas Syari'ah selesai tahun 2018.



Bandar Lampung, Juli 2018

Yang Membuat

Fitri Apri Yanti

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan, alhamdulillah telah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini di tulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Patut disadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari semua pihak yang dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati disertai rasa tanggung jawab penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I selaku Penguji II sekaligus Ketua Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta selaku Pembimbing I

yang telah banyak memberikan saran, arahan dan motivasi serta meluangkan waktu.

4. Hj.Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi saran, arahan dan motivasi serta meluangkan waktu.
5. Seluruh Dosen dan Staf Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Semua sahabat Kelas B Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan semangat dan informasi dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Sahabatku Fitria Wulandari yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta menjadi inspirasi untuk mengejar dan meraih kesuksesan.
8. Sahabatku Dewi Agustina yang memberikan semangat serta kawan seperjuangan seminar proposal sampai dengan penyusunan skripsi.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kekurangan kemampuan serta waktu yang dimiliki, dan semoga dapat memberikan saran dan masukan guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan skripsi ini dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Bandar Lampung, Juli 2018

Penulis

Fitri Apri Yanti

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kepemimpinan	
1. Definisi Kepemimpinan	12
2. Teori Peran.....	14
3. Teori Kepemimpinan	15
4. Fungsi pemimpin.....	18

5. Karakteristik Kepemimpinan	19
B. Pandangan Fiqh Siyasah tentang Kepemimpinan	
1. Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah.....	22
2. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqh Siyasah.....	25
3. Syarat-Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqh Siyasah.....	32
4. Ciri-Ciri Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah.....	34
5. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah.....	38
C. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1. Pengertian dan Dasar Hukum LPMD	42
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPMD.....	43
3. Susunan pengurus dan Tata kerja LPMD.....	44
4. Masa kerja, pengangkatan, dan pemilihan pengurus LPMD	45
5. Sumber dana LPMD.....	45

BAB III PERAN LPMD DI DESA BIHA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

A. Gambaran Umum Desa Biha	47
1. Letak Geografis Desa Biha	51
2. Tata Kelola Desa Biha	53
3. Visi dan Misi Desa Biha	62
B. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Biha	63
C. Kedudukan dan Peran LPMD dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa	65
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program LPMD	69

E. Program LPMD dalam Pembangunan Desa Biha.....	70
--	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran LPMD dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa.....	73
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran LPMD dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul

Sebagai kerangka awal menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desadalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.²

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.³

Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam peranannya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.⁴

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desaadalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa

²Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 951.

³Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1991), h.2.

⁴*Ibid*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h.1051.

masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.⁵

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.⁶

Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan orang yang mengepalai desa.⁷

Dari pengertian-pengertian istilah tersebut, maka yang dimaksudkan dengan judul di atas dapat ditegaskan bahwa suatu hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara terhadap peranan suatu Lembaga yang menggerakkan suatu pekerjaan dari seorang Pemimpin Desa.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk proposal antara lain:

1. Alasan Objektif

- a. Belum adanya komunikasi yang baik dari LPMD untuk membangun desa yang lebih baik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan, adanya cemburu sosial antar warga masyarakat karena pembangunan hanya dilakukan di satu dusun.
- b. LPMD belum menerapkan asas keterbukaan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan desa, sedangkan jabatan dipandang

⁵Aries Djaenuri, Siti Aisyah, Enceng, *Sistem Pemerintahan Desa*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2016), h.5.20-5.21.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 190.

⁷*Ibid.*, h. 671.

sebagai amanah, perkara berat yang kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul skripsi ini pembahasannya sangat relevan dengan ilmu yang penulis tekuni dan pelaksanaan tugas akademik yaitu sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya literatur dan sarana yang mendukung penelitian dalam rangka menyelesaikan penelitian ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya, desa dapat membuat peraturan desa (perdes). Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten/kota membuat peraturan daerah.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.⁸

⁸Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), h. 129.

Berkaitan dengan kewenangan desa diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁹

Meski kepala desa berwenang menetapkan peraturan desa namun rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang telah ditetapkan menjadi peraturan desa wajib diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.¹⁰

Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, menetapkan bendahara desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada perangkat desa yang pengaturannya dilakukan melalui suatu peraturan desa.

Pengelolaan keuangan desa hendaklah didasarkan pada asas-asas. (1) Partisipatif, mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam keuangan desa. (2) Transparan dan Akuntabel, keuangan desa harus dapat menyajikan

⁹*Ibid.*, h. 126.

¹⁰*Ibid.*, h. 130.

informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (transparan) dan setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Secara garis besar, LPMD mengemban fungsi sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan di desa dan sekaligus merupakan wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di desa termasuk kegiatan PKK, koperasi dan lain sebagainya.¹²

Namun permasalahan di desa biha yang diamati bahwasanya dalam pengelolaan keuangan desa tidak memenuhi asas-asas salah satunya tidak adanya transparan. Suatu desa mempunyai lembaga kemasyarakatan salah satunya LPMD, yang mempunyai fungsi sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan di desa membantu tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Dengan adanya peran dari LPMD seharusnya kegiatan pembangunan desa di setarakan untuk semua dusun-dusun. Namun di desa biha pembangunan desa hanya difokuskan pada satu dusun saja, sehingga timbul rasa cemburu sosial dalam masyarakat. Dari masalah ini dipertanyakan dimana peran dari LPMD tersebut dalam menggerakkan kebijakan Kepala Desa.

¹¹*Op. Cit.*, Aries Djaenuri, h. 2.62.

¹²*Ibid*, h. 5.14

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desadalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa.
- b. Untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Fiqh Siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (studi di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.
- b. Kegunaan secara praktisnya yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam

menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹³ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

1. Jenis sifat penelitian

- a. Jenis Penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang langsung dilaksanakan dilapangan.¹⁴ Yang menjadi objek penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desadalam menggerakkan Kebijakan Kepala Desa di Desa Biha Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Sifat Penelitian, yaitu penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel Desa Biha dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitiuan ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan

¹³Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21.

¹⁴*Ibid* ., h. 10.

¹⁵Nazir, M, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 43.

sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung yang dijadikan observasi dengan para pegawai kantor Desa Biha dalam menetapkan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menggerakkan Kebijakan Kepala Desa dilihat dari Fiqh Siyasah (Studi Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.¹⁶

3. Populasi

Populasi adalah semua yang dijadikan objek pendukung bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda lainnya yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang terlibat di desa dalam menggerakkan kebijakan Kepala Desa di Desa Biha Kabupaten Pesisir Barat. Jumlah populasinya 12 orang terdiri dari :

- a) 1 orang sebagai Kepala Desa, yaitu orang yang mengepalai Desa itu sendiri.
- b) 1 orang sebagai ketua LHP karena salah satu tugas LHP membahas Rancangan Peraturan Desa.

¹⁶Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991), h.132.

- c) 7 orang sebagai aparat pekon karena aparat pekon merupakan bawahan Kepala Desa yang mengatur segala urusan kedesaan baik dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan, perencanaan, keuangan dan pelayanan.
- d) 3 orang sebagai pemangku pekon karena salah satu fungsi pemangku pekon adalah melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan.

Karena populasinya terdiri dari 12 orang dan semua populasinya diwawancarai, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Metode observasi

Metode Observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencatat data-data yang bersumber data Desa Biha serta mengamati faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Peran LPMD khususnya dalam pembangunan Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.¹⁸

b. Metode Interview

Metode interview yaitu proses memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

Ada tiga cara untuk melakukan interview :

- 1) Melalui percakapan informal (interview bebas).

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-11, h.174.

¹⁸Soeratno, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1995), h. 99.

2) Menggunakan pedoman wawancara.

3) Menggunakan pedoman buku.¹⁹

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode dokumentasi penulis melakukan dengan cara mengambil data tentang aktivitas pada lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat di dalam masyarakat di Desa Biha Kabupaten Pesisir Barat.²⁰

5. Metode Pengolahan Data

Apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Sistematicing* adalah melakukan pengecekan data/bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
- b. *Editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan, keseragaman satuan data sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari literature.²¹

c.

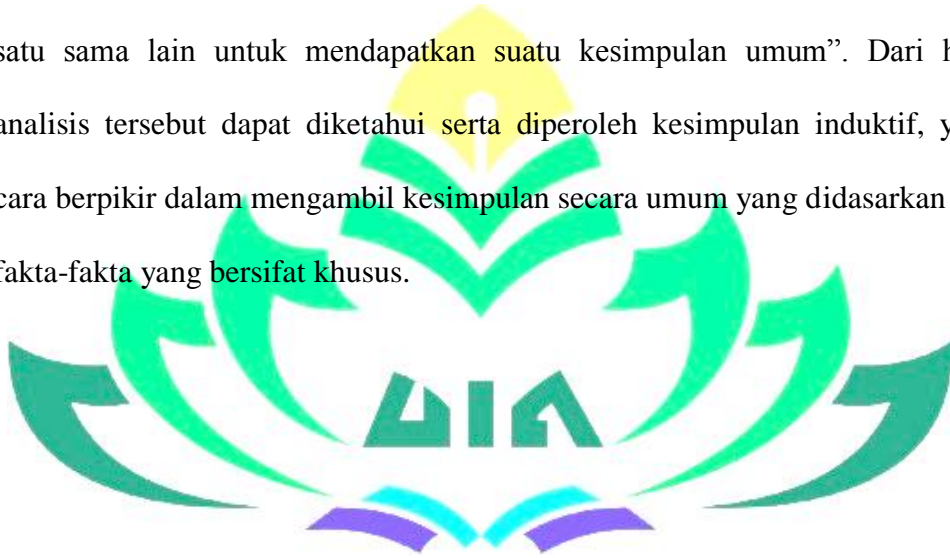
¹⁹Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 58-59.

¹⁸Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : PPM, 2014), h. 41-43.

¹⁹Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2010), h. 56.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu menggunakan teknik berpikir, melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan

1. Defenisi Kepemimpinan

Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan suatu faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu organisasi, dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemimpinan dalam suatu organisasi, diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan guna meningkatkan kinerja instansinya.

Kepemimpinan adalah “kemampuan seseorang (yaitu pemimpin) untuk memengaruhi orang lain (yaitu pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana dikehendaknya oleh pemimpin tersebut.”²²

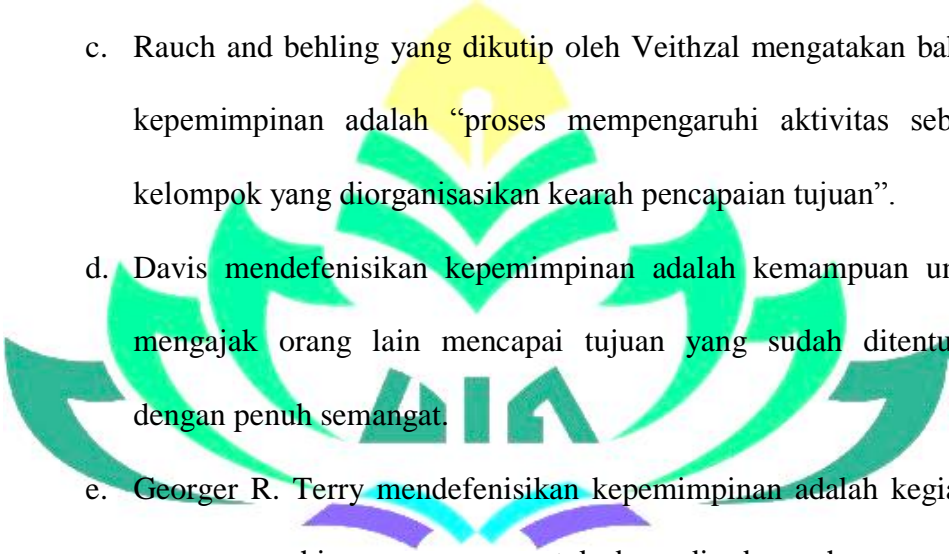
Defenisi kepemimpinan menurut beberapa ahli, sebagai berikut²³ :

- a. Robbins kepemimpinan adalah “kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan”.
- b. Fairchild mengatakan bahwa “ kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktifitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk

²² Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2013), h. 250.

²³ Veithzal, Et.al, *Pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2013), h. 3-4

memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi”.

- 
- c. Rauch and Behling yang dikutip oleh Veithzal mengatakan bahwa kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan”.
 - d. Davis mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat.
 - e. George R. Terry mendefinisikan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama.
 - f. Slamet mengatakan kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk memengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi bawahan atau kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memberi tugas, merumuskan tujuan dan program pencapaiannya. Setiap bawahan harus melaksanakannya tanpa mentimpang, sehingga dalam hal

ini kepemimpinan bisa juga diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

2. Teori Peran

“Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.²⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa²⁵ :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang sangat penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. “Gejala tersebut terutama disebabkan

²⁴Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 212.

²⁵*Ibid*, h. 213.

adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme”.²⁶

3. Teori kepemimpinan

Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Beberapa teori kepemimpinan diantaranya sebagai berikut²⁷ :

- a. Suatu penggeneralisasian dari suatu seri fakta mengenai sifat-sifat dasar dan perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinan.
- b. Dengan menekan latar belakang historis, dan sebab musabab timbulnya kepemimpinan serta persyaratan untuk menjadi pemimpin.
- c. Sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin, tugas-tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi yang perlu dipakai oleh pemimpin.

Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Oleh karena itu, memilih seorang pemimpin harus mempertimbangkan banyak hal diantaranya adalah jejak langkah, sifat,

²⁶ *Ibid*, h. 216.

²⁷ Kartini kartono, *Pemimpin dan kepemimpinan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1992), h. 3.

perilaku yang baik serta mempertimbangkan apakah seseorang tersebut mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan baik.

Sementara itu, George Robert Terry mengemukakan sejumlah teori kepemimpinan, sebagai berikut²⁸ :

1) Teori Otokratis

Kepemimpinan berdasarkan atas perintah, paksaan dan tindakan-tindakan yang *arbitrer*. Pemimpin melakukan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung serta efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada struktur organisasi dan tugas-tugas.

2) Teori Psikologis

Pemimpin harus mampu memunculkan dan mengembangkan motivasi terbaik, sehingga mereka mau bekerja agar mencapai sasaran-sasaran organisatoris maupun untuk memengaruhi tujuan-tujuan pribadi.

3) Teori Sosiologis

Pemimpin berusaha melancarkan antar-relasi dalam organisasi dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikutnya, agar tercapai kerjasama yang baik.

²⁸ *Ibid*, h. 71-80.

4) Teori Suportif

Pengikut berusaha dan bekerja dengan baik, sedangkan pemimpin sebagai pembimbing.

5) Teori Laissez Faire

Kepemimpinan Laissez Faire ditampilkan oleh seorang tokoh “ketua dewan” yang sebenarnya tidak bisa apa-apa dan menyerahkan semua tanggungjawab kepada bawahan, tokoh hanya merupakan simbol.

6) Teori Kelakuan Pribadi

Pemimpin terpilih berdasarkan kualitas dan kuantitas pribadi atau pola kelakuan pemimpinnya, seorang pemimpin harus mampu bersikap fleksibel, luwes, bijaksana, tahu kondisi, dan mempunyai daya lenting yang tinggi karena ia harus mampu mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk suatu masalah.

7) Teori Sifat Orang-orang Besar (Traits of Great Men)

Pemimpin mempunyai intelegensi tinggi, inisiatif, energik, kepercayaan diri, kedewasaan emosional, memiliki daya persuasif dan komunikatif.

8) Teori Situasi

Pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah aktual

9) Teori Humanistik/Populistik

Pemimpin merealisasikan kebebasan dan memenuhi kebutuhan insani yang dicapai melalui interaksi pemimpin dengan rakyat.

4. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi dalam menciptakan hubungan dengan bawahannya serta mempunyai pengaruh terhadap organisasi yang dipimpin.

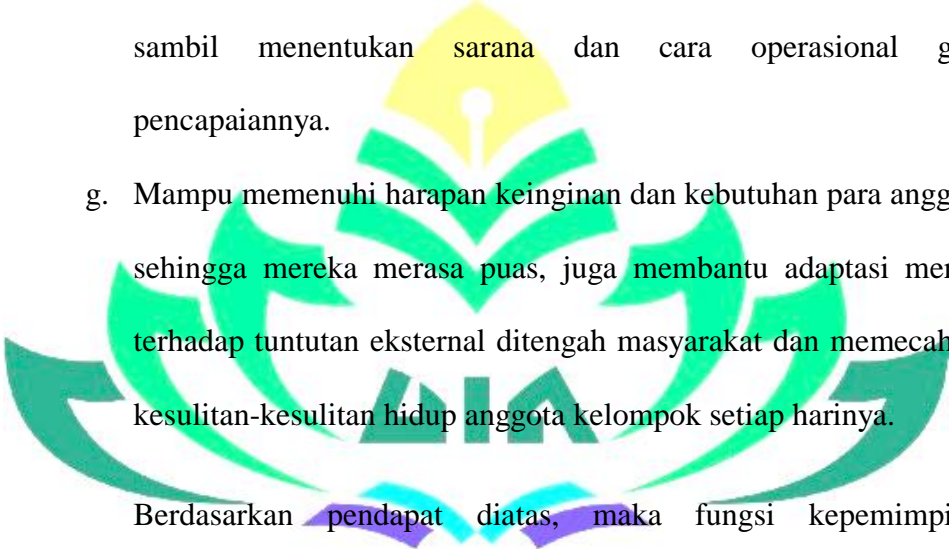
Menurut Kartini, fungsi kepemimpinan adalah “memandu, menuntun, membimbing, membangun, member atau membangun motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik dan memberikan supervise/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan”.²⁹

Mengurai fungsi kepemimpinan dalam kelompok, yaitu sebagai berikut³⁰ :

- a. Memelihara struktur kelompok, menjamin interaksi yang lancar dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas.
- b. Mensinkronkan ideologi, pikiran dan ambisi anggota-anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin.
- c. Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh.
- d. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kepemimpinan, bakat dan produktifitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi.

²⁹*Ibid*,h. 93.

³⁰*Ibid*, h. 117-118.

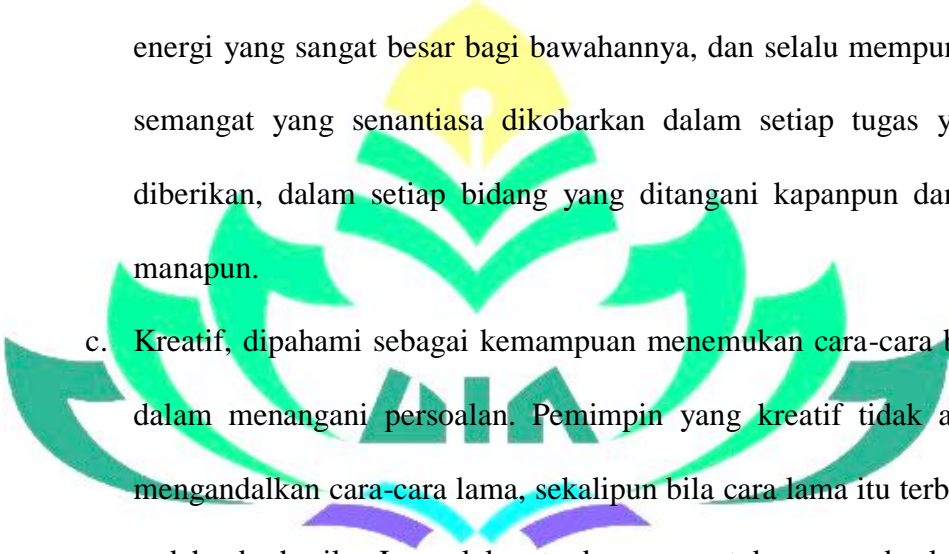
- 
- e. Menegakkan peraturan, larangan, disiplin dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan kelompok, meminimalisir konflik dan perbedaan-perbedaan.
 - f. Merumuskan nilai-nilai kelompok dan memilih tujuan kelompok sambil menentukan sarana dan cara operasional guna pencapaiannya.
 - g. Mampu memenuhi harapan keinginan dan kebutuhan para anggota, sehingga mereka merasa puas, juga membantu adaptasi mereka terhadap tuntutan eksternal ditengah masyarakat dan memecahkan kesulitan-kesulitan hidup anggota kelompok setiap harinya.

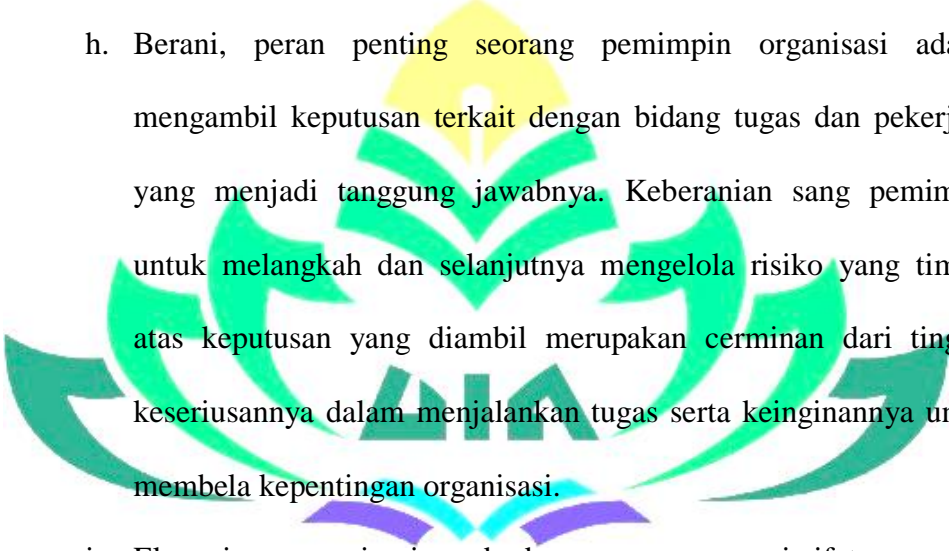
Berdasarkan pendapat diatas, maka fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu.

5. Karakteristik Kepemimpinan

Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting guna menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi. Seorang pemimpin mempunyai beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:³¹

³¹ Siti patimah, *managemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta,2015), h. 19-20.

- 
- a. Visioner, pemimpin harus mempunyai visi atau pemahaman yang jelas tentang mau dibawa kemana organisasinya dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapainya.
 - b. Penuh semangat, seorang pemimpin yang baik harus membawa energi yang sangat besar bagi bawahannya, dan selalu mempunyai semangat yang senantiasa dikobarkan dalam setiap tugas yang diberikan, dalam setiap bidang yang ditangani kapanpun dan dimanapun.
 - c. Kreatif, dipahami sebagai kemampuan menemukan cara-cara baru dalam menangani persoalan. Pemimpin yang kreatif tidak akan mengandalkan cara-cara lama, sekalipun bila cara lama itu terbukti sudah berhasil. Ia selalu terdorong untuk mengeksplorasi kemungkinan lain di dalam menangani suatu persoalan.
 - d. Fleksibel, pemimpin yang fleksibel dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan baru dan cekatan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan.
 - e. Inspiratif, tugas utama seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi pada orang untuk bekerja mewujudkan hal-hal hebat dengan sumber daya yang terbatas.
 - f. Inovatif, dalam memimpin organisasinya, pemimpin dituntut untuk memiliki sikap yang inovatif. Dengan memiliki visi dan misi yang progresif, yang senantiasa menawarkan ide-ide segar yang mengusung perubahan dan pembaharuan.

- 
- g. Imajinatif, imajinasi adalah sebuah kualitas yang lebih penting daripada pengetahuan. Karena, semua penggunaan bakat, intelek, pendidikan dan pengalaman ditentukan arahnya oleh apa yang dibayangkan dalam pikiran.
 - h. Berani, peran penting seorang pemimpin organisasi adalah mengambil keputusan terkait dengan bidang tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Keberanian sang pemimpin untuk melangkah dan selanjutnya mengelola risiko yang timbul atas keputusan yang diambil merupakan cerminan dari tingkat keseriusannya dalam menjalankan tugas serta keinginannya untuk membela kepentingan organisasi.
 - i. Eksperimen, pemimpin pada dasarnya mempunyai sifat yang suka mencoba-coba hal baru, karena sudah seharusnya sifat pemimpin adalah berani mengambil keputusan.
 - j. Independen, seorang pemimpin harus memiliki sikap independen yang artinya pemimpin tersebut netral, tidak dipakai oleh pihak manapun. Independen dalam hal ini bukan berarti menjaga jarak sama sekali dengan pihak lain. Pemimpin tetap butuh dukungan dari pihak manapun. Untuk itu bisa disiasati dengan melakukan komunikasi serta terbuka dan transparan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka pemimpin merupakan suatu sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat bersama-sama bekerja demi

mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan akan berjalan secara efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang cerdas bukanlah suatu jaminan untuk memimpin suatu unit organisasi yang efektif dan efisien, karena seorang pemimpin selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin juga dituntut berperilaku sebagai panutan dan tauladan bagi bawahannya.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Kepemimpinan

1. Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum³², dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.³³

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di

³²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), h. 428.

³³Ali al-salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), h. 15.

dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah al-Shugra*. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.³⁴

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.³⁵

Secara bahasa *Amir* berasal dari kata (*Amara-ya'muru-amran*) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah.³⁶

Kata-kata *Amir* dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata "*amara*" banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah *Amir* dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan

³⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 54.

³⁵ Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 21.

³⁶ Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000), h. 344.

sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata “dari kami ada *Amir* dan dari Tuan-tuan juga ada *Amir*”. Selain itu, istilah amir juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar.³⁷

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah *Malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamliku-milkan*) yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.³⁸ *Sulthan* secara bahasa berarti *Malik* (Raja) atau wali.

Perhatikan Rasulullah menggunakan kata *Sulthan* karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah *mafhum* di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan *sulthan*, kepala negara dan *malik*. Di Indonesia kata *Sulthan* lebih banyak dikenal daripada *Khalifah*, *Imam*, *Malik* atau *Amir*. Kata *Sulthan* diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja / Kepala Pemerintahan Muslim.³⁹

³⁷ A. Djazuli, *Op.Cit*, h. 59.

³⁸ Mahmud Yunus, *Log.Cit*, h. 428.

³⁹ A. Djazuli, *Op.Cit*, h. 60.

2. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Dalam setiap pemilihan calon pemimpin, masih banyak umat Islam yang menyia-nyiakan suaranya, sehingga tidak sedikit calon pemimpin Islam yang kalah dalam pertarungan. Padahal mengangkat pemimpin dalam Islam diperintahkan, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadist. Dalam Q.S An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa orang-orang mukmin diperintahkan patut kepada Allah, Rasul dan penguasa mereka. Perintah patut ini wajib dilaksanakan maka wajib pula memilih pemimpin.

Dalam Hadist riwayat Abu Dawud diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda yang artinya : “jika ada tiga orang dalam perjalanan, hendaklah mereka menjadikan pemimpin salah seorang diantara mereka”. Dalam perjalanan saja diperintahkan agar mengangkat seorang pemimpin, apalagi dalam bermasyarakat dan bernegara, tuntutan perintah mengangkat pemimpin tentunya lebih besar lagi. Karena itu, para sahabat dan tabi'in ijma' (sepakat) atas wajibnya mengangkat pemimpin atau kepala negara. Kenyataan sosial juga menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup harmonis tanpa adanya pemimpin yang sah mengatur pergaulan mereka.

Tentang wajibnya mengangkat kepala negara dari masa kemasa sepakat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Al-Imam Al-Bagdadi berkata : “sesungguhnya mengangkat imam (pemimpin) adalah suatu fardhu yang wajib”. Al-Imam Al-Mawardi berkata : “kepemimpinan dibuat untuk menggantikan Nabi dalam menjaga agama dan mengatur

dunia”. Al-Imam Ibn Hazm berkata : telah sepakat seluruh ulama Sunni, Syi’ah dan Murji’ah, mayoritas pengikut Mu’tazilah dan Khawarij, kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya. Ibnu Kaldun berkata : “sesungguhnya mengangkat pemimpin adalah wajib yang diketahui dalam syara’ dengan ijma’ sahabat dan tabi’in”. Allah SWT berfirman : Q.S An-Nisa : 144, Al-Maidah : 51 dan 57



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أَتُرِيدُونَ أَنْ
تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).”(Q.S. An-Nisa:144)

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”(Q.S.Al-Maidah : 51)



Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang Telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”(Q.S.Al-Maidah : 57)

Sedangkan menurut golongan najdat, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat

pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.⁴⁰

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.⁴¹

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan *Al-Asham* dan mengatakan bahwa *Al-Asham* adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut Al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.⁴²

Selain dalil ini yang menjadi dalil Al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Khamami Zada, Fiqh Siyasaht Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 108.

⁴¹ Mujar Ibnu Syarif, *Ibid*, h. 108-109.

⁴² Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi, penerjemah Fathurrahman dkk, dari al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 588.

Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, "dari kami *amir* dan dari kalian *amir*."⁴³

Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, "Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini". Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata, "pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib."⁴⁴

Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual (Wajib *ain*), tetapi kewajiban kolektif (wajib *kifa'i/fardu kifayah*). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa

⁴³*Ibid*, h. 589.

⁴⁴*Ibid*,h.590.

akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.⁴⁵

Ibn Taimiyah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari agama dan sarana *bertaqarrub* kepada Allah. Sebab *bertaqarrub* kepada-Nya dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, termasuk dalam *taqarrub* yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan.⁴⁶

Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi'ah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan imam itu bukanlah masalah *ijtihadiah* yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk imam, bukan

⁴⁵ Mular Ibnu Syarif, *Op.Cit*, h. 111.

⁴⁶ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syariyah Etika Politik Islam, Terjemahan Rofi' Munawwar, dari Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islahi al-Râ'iy wa Al-Râ'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 227.

rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang boleh menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.⁴⁷

Sedangkan kaum Mu'tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan.

Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi seorang pemimpin itu.⁴⁸

3. Syarat-Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqih Siyasah

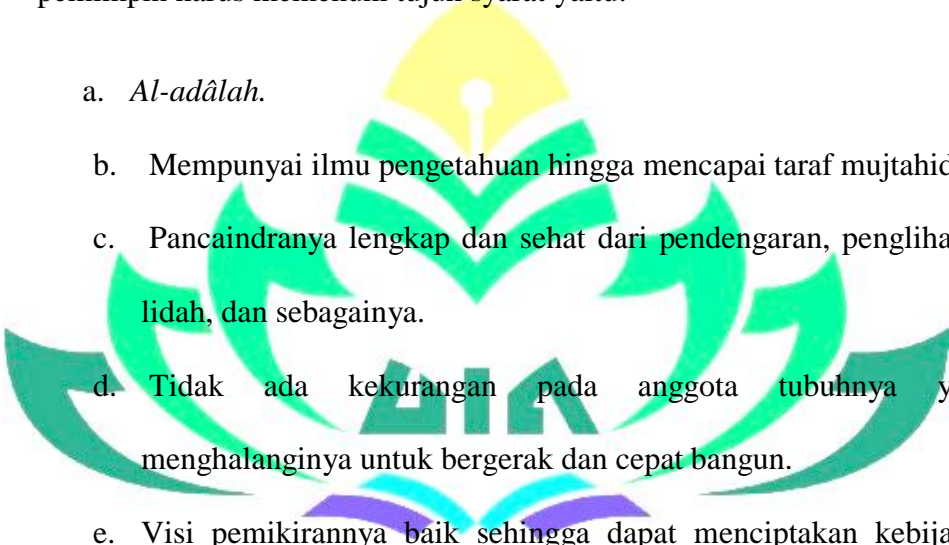
Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin dalam Al-Mawardi mengemukakan bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai

⁴⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Log.Cit*, h. 111.

⁴⁸ *Ibid*, h.113.

kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.⁴⁹

lebih lanjut Al-Mawardi mengemukakan persyaratan menjadi pemimpin harus memenuhi tujuh syarat yaitu:

- 
- a. *Al-adâlah.*
 - b. Mempunyai ilmu pengetahuan hingga mencapai taraf mujtahid.
 - c. Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya.
 - d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
 - e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
 - f. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya.
 - g. Nasab dari keturunan Quraisy.⁵⁰

Abdul Qadir Audah dalam A. Hasjmy menetapkan syarat khalifah delapan syarat :

- 1) Islam, diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir, berdasarkan QS.Ali Imran : 28

⁴⁹ Imam al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, (Kairo : Darul Falah, 1973), h. 5.

⁵⁰ *Ibid*

2) Laki-laki. Seorang wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan.

3) Taklif. Yaitu sudah dewasa, di mana jabatan khalifah adalah penguasaan atas orang lain.

4) Ilmu Pengetahuan. Yaitu ahli dalam hukum Islam sampai bila mungkin mencapai taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui hukum internasional, traktat, dan perdagangan internasional, dan lain-lain.

5) Adil. Yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar.

6) Kemampuan dan Kecakapan. Yaitu di samping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam.

7) Sehat Jasmani dan Rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat.

8) Keturunan Quraisy. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Karena hadits yang mengatakan imam dari Quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Ditujukan

untuk maksud terbatas, yaitu waktu dan tempat terbatas. Jadi tidak berlaku secara umum.⁵¹

4. Ciri-Ciri Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah

Kepemimpinan adalah “suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat Islam dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.”⁵²

Adapun ciri-ciri pemimpin Islami adalah sebagai berikut :

- a. Taat kepada Allah dan Rasulnya⁵³, Allah SWT berfirman : QS. Ali Imran : 32

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-

⁵¹ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 164.

⁵² Veitzal, *Et.al Op. Cit* h. 29.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : yayasan penyelenggaraan penterjemah al-qur'an, 1971), h. 128

Qur'an telah memberikan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.

- b. Beriman dan beramal shaleh,⁵⁴ Allah SWT berfirman : QS. Al-Bayyinah : 7

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk”.

- c. Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

- d. Berpegang pada hukum Allah SWT (Al-Qur'an dan hadist)

Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.

- e. Menjalankan amanah,⁵⁵ Allah SWT berfirman : QS. Al-Anfal : 27

⁵⁴*Ibid*, h. 1085.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

f. Memutuskan perkara dengan adil,⁵⁵ Allah SWT berfirman : QS.

An nahl : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيرٌ ﴾

وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

g. Mencintai bawahan

Untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai gunakanlah hati dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan

⁵⁵Ibid, h. 264.

⁵⁶Ibid, h. 415.

pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Setiap menugaskan suatu pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan tujuan akhir apa yang sesungguhnya harus dicapai. Bentuk ini nampaknya mulai ditinggalkan oleh sebagian pemimpin.

h. Lemah lembut dan bersikap tegas

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan di berbagai situasi dan kondisi, apalagi dalam *beramal ma'ruf nahi munkar*. Lembut ada tempatnya dan tegas ada saatnya. Kelembutan harus dikedepankan dan diutamakan dalam kepemimpinan, sedang ketegasan merupakan solusi akhir jika kelembutan tak mampu menyelesaikan persoalan.

5. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

a. Dipilih oleh *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlul halli wal aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai madzhab tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu

hanya sah dengan keikutsertaan seluruh *ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu.⁵⁷

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh *ahlul halli wal aqdi*. Hal ini agar seluruhnya ridho atas pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut.⁵⁸ Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifat tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh anggota *Ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu di dasarkan oleh dua hal. Pertama: Baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah: Umar Ibnu Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrait, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzairah r.a. Kedua: Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan

⁵⁷ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, h.

⁵⁸ Abu Yala al-Farra, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Fikr, 1994), h.

persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *mutakallimîn* dari penduduk Bashrah.⁵⁹

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memegang jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti halnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., “Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.” Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah saw telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentanginya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.”⁶⁰

b. Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya

Menurut al-Mawardi pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukkan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan

⁵⁹Al-Mawardi, *Op.Cit*, h.6.

⁶⁰*Ibid*, h. 7.

sepeninggalnya kepada lembaga *asyura*. Anggota lembaga *syura* yang notaben adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagaimana sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatan nya dalam lembaga *syura*, “ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.”⁶¹

c. Persetujuan Umat

Imam Ahmad dalam menafsirkan hadits “Barangsiapa mati dalam keadaan ia tidak memiliki pemimpin maka ia mati dengan kematian jahiliyah” mengatakan, “Tahukah kamu apa itu pemimpin? Dia adalah yang kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, ‘ini adalah pemimpin’ ini adalah makna dan pengertian yang dimaksud”

Ibn Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar mengatakan bahwa seandainya waktu itu Umar bin Khattab dan sekelompok orang membaiat Abu Bakar namun para sahabat yang lain tidak bersedia untuk membaiat Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, waktu itu Abu Bakar bisa menjadi imam berdasarkan pembaiatan jumur sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan dan pengaruh.⁶²

⁶¹ *Ibid*, h.10.

⁶² Ibn Taimiyah, *Minhaju al-Sunnah al-Nabâwiyyah*, (Baulaq, tp, tt), jld. I, h. 141-142.

C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

1. Pengertian Dan Dasar Hukum LPMD

a. Pengertian LPMD

LPMD adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Pada masa yang lalu, lembaga ini disebut sebagai lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).⁶³

b. Dasar Hukum LPMD

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Peraturan Lembaga Kemasyarakatan
- 3) Peraturan Daerah/Kota Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 4) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

⁶³ Aries Djauenuri, siti aisyah, enceng, *Sistem Pemerintahan Desa*, (Tangerang selatan : universitas terbuka, 2016), h. 5.20

2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi LPMD

a. Kedudukan LPMD

- 1) LPMD berkedudukan di Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri mandiri.
- 2) LPMD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.⁶⁴

b. Tugas dan Fungsi LPMD

Adapun menurut Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tugas dan Fungsi LPMD adalah sebagai berikut :

- 1) Tugas LPMD dalam Pasal 8 yaitu :
 - a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
 - b) Menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat
 - c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
- 2) Fungsi LPMD dalam Pasal 9 yaitu :
 - a) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b) Penanaman dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

⁶⁴*Ibid.*

- c) Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat.
- f) Penggalan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.⁶⁵

3. Susunan Pengurus Dan Tata Kerja LPMD

a. Susunan pengurus LPMD

Susunan Pengurus LPMD terdiri dari :

- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- 3) Seksi

Seksi sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas

- a) Seksi kamtibmas
- b) Seksi lingkungan hidup
- c) Seksi kesehatan
- d) Seksi agama
- e) Seksi pendidikan dan perpustakaan

⁶⁵Firman Sujadi, *Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Bee Media Oustaka, 2015), h. 59.

f) Seksi pemuda dan kesehatan

g) Seksi PKK⁶⁶

b. Tata Kerja LPMD

1) Ketua LPMD tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa.

2) Setiap pengurus LPMD wajib menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

4. Masa Kerja, Pengangkatan, dan Pemilihan Pengurus LPMD

Masa kerja pengurus lembaga kemasyarakatan desa adalah 5 (lima) tahun. Pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dilaksanakan secara demokratis dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat melalui musyawarah.⁶⁷

5. Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan Desa

Sumber dana lembaga kemasyarakatan desa dapat diperoleh dari :

a) Swadaya dan partisipasi masyarakat desa

b) Bantuan dari pemerintah desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa

c) Bantuan pemerintah kabupaten

⁶⁶*Op.Cit.*, h. 5.21.

⁶⁷*Ibid.*,

- d) Bantuan pemerintah provinsi
- e) Bantuan pemerintah lainnya yang sah dan tidak mengikat.⁶⁸



⁶⁸*Ibid.*, h. 5.23.

BAB III

PERAN LPMD DALAM MENGGERAKKAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DI DESA BIHA KABUPATEN PESISIR BARAT

A. Gambaran Umum Desa Biha

Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung, merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat. Yang disahkan berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 april 2013.

Menurut sejarah orang yang pertama kali menjejakkan kaki di daerah ini bernama Kattudin bin ibnu Hajar yang konon katanya berasal dari daerah Paya Kumbuh Sumatra Barat. Kattudin bersama dua saudaranya merantau dari paya kumbuh untuk mencari ilmu dan pengalaman. Kattudin merupakan bungsu dari tiga bersaudara. Daerah pertama yang mereka singgahi adalah bengkulu. Di bengkulu kakak tertuanya yang bernama Ibduallah menikah dengan seorang gadis bengkulu. Kemudian Kattudin bersama kakak keduanya yang bernama Ibnu Hasan melanjutkan pertualangan hingga sampai di daerah yang sekarang bernama Manna. Ibnu Hasan berjodoh dengan gadis ini dan menetap di manna. Selanjutnya Kattudin melanjutkan pertualangan seorang diri dengan menyusuri pantai mencari tempat yang cocok untuk bermukim.

Lokasi pertama Kattudin mendarat diberi nama Merampuihan (sekarang Way Telu atau Karang Nyimbor). Lalu Kattudin melanjutkan perjalanan

dengan jalan kaki ke arah hutan dengan melalui tebing yang cukup tinggi (Teba Kelahang) dan melintas anak sungai (Siring Kebayan) hingga menemukan daerah yang dianggap cocok untuk bermukim yang sekarang dikenal dengan nama Atar (Hamparan) Bulan Bara atau Sabah Tuha.

Setelah menemukan tempat pemukiman Kattudin kembali ke Pagaruyung untuk menjemput kerabat-kerabat disana yang salah satunya bernama Lapati Kekak sehingga terbentuklah sebuah pemukiman yang berkembang pesat hingga terbentuk 12 peratin saat itu.

Pada masa kejayaan itulah Kattudin menikah dengan seorang gadis bernama Biha. Pada acara pernikahan itu mengadakan Tayuhan Balak karena Kattudin dinobatkan menjadi Raja atau pemimpin dan Lapati Kekak dinobatkan menjadi patih atau panglima dengan wilayah kekuasaan mulai dari Merampuihan hingga Ulok Pandan (Way Marang) dengan pusat keratuan Desa Pematang Banding. tak jauh dari pusat keratuan terdapat sebuah sungai yang dijadikan tempat pemandian (pangkalan mandi) dan sungai itu diberi nama Way Biha.

Salah satu Desa yang berada dipinggiran Way Biha bagian hulu yang bernama Kesugihan bermaksud membendung aliran Way Biha untuk dijadikan sumber pengairan dan bermaksud pula mencetak sawah di daerah itu untuk kemakmuran masyarakatnya. Hingga suatu saat datang dua orang sakti yang sanggup memenuhi harapan peratin Kesugihan dengan syarat apabila program tersebut berhasil kedua orang sakti tersebut dinikahkan dengan gadis

dari Desa Kesugihan. Peratin Kesugihan menyanggupi persyaratan yang diajukan dan kedua orang sakti tersebut memulai pekerjaan membendung sungai dengan membentangkan seutas tali seraya memanjatkan doa sehingga benda apapun yang menyentuh tali tersebut menjadi batu sehingga akhirnya bendunganpun selesai atau dikenal dengan “Pakor”.

Ketika air mulai tergenang penguasa masa itu memerintahkan kedua orang sakti tersebut membuat saluran yang diarahkan ke lokasi persawahan yang sekarang dikenal dengan nama Atar Puding dan saluran ini diberi nama Siring Sehaji.

Ketika pekerjaan selesai ternyata penguasa saat itu ingkar janji, kedua orang sakti itu tidak mendapatkan haknya untuk menikahi gadis dari Desa tersebut sehingga membuat keduanya murka dan keduanya kembali memanjatkan doa agar Pakor yang baru selesai dibangun dihancurkan kembali. Doa keduanya terkabul dan terjadi hujan tujuh hari tujuh malam sehingga banjir besar memporak porandakan Pakor yang baru dibangun. Tak lama berselang wabah penyakitpun datang menyerang dengan menelan banyak korban. Warga yang tersisa mengungsi dan berjalan kearah barat sehingga menemukan sebuah tempat pemukiman di pinggir pantai yang menghadap langsung samudra hindia dan sejak itu menetap disana dengan sebutan Desa Biha.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Ikhwansyah selaku Sekretaris Desa Biha, Tanggal 7 Mei 2018, jam 10.00 WIB, di Kantor Desa Biha.

Dalam perkembangannya Biha saat ini terdiri dari beberapa suku disamping penduduk asli Lampung seperti Jawa, Sunda, Padang, dan Bali. Tentunya berpengaruh pada budaya, ekonomi masyarakat, namun demikian nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah tetap dilestarikan masyarakat.

Mata pencaharian masyarakat Desa Biha rata-rata adalah petani, masyarakat memanfaatkan tanah yang subur dengan bercocok tanam dengan menanam berbagai macam tanaman seperti padi, karet, palawija dan lainnya. Namun ada juga masyarakat yang memanfaatkannya untuk usaha berbisnis dan nelayan. Selain itu juga masyarakat ada yang bekerja di instansi pemerintahan dan lain sebagainya, masyarakat akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan menekuni berbagai pekerjaan.

Adapun komposisi penduduk menurut mata pencarian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Biha

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	1975
PNS	40
Buruh	173
Guru	30
Dagang	37

Pensiunan	6
Swasta	15

Sumber : Kantor Desa Biha

Pada tingkat mata pencaharian masyarakat Desa Biha di mayoritas oleh petani yang masih tradisional. ini merupakan penghambat untuk menggerakkan kebijakan kepala Desa karena dalam mata pencaharian masyarakatnya saja lebih di mayoritas petani.

1. Letak Geografis Desa Biha

Jumlah penduduk dan luas wilayah Desa Biha adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Biha

a. Jumlah Penduduk

Laki-Laki	1686
Prempuan	1561

Sumber : Kantor Desa Biha

Pada jumlah penduduk Desa di mayoritas oleh kaum laki-laki, salah satunya disebabkan karena banyaknya penduduk yang imigrasi.

Tabel 3

Luas Wilayah Desa Biha

b. Luas Wilayah

Sawah	225 Ha
Ladang	2 Ha
Perkebunan	52 Ha
Perikanan	10 Ha

Sumber : Kantor Desa Biha

Pada tingkat luas wilayah Desa Biha di mayoritas oleh lahan sawah karena banyaknya mata pencaharian masyarakat dalam bertani. untuk membantu Kepala Desa menggerakkan kebijakan-kebijakannya masyarakatnya harus mengetahui dalam hal pembangunan dan pengetahuan lainnya.

Table 4

Tingkat Pendidikan

c. Tingkat Pendidikan

Tidak sekolah	538
Tidak tamat SD	305
Tamat SD	227
SLTP/Sederajat	219
SLTA/Sederajat	132
Perguruan Tinggi	74

sumber : Kantor Desa Biha

pada tingkat pendidikan masyarakat Desa Biha, masyarakatnya lebih didominasi oleh masyarakat yang sama sekali tidak merasakan bangku sekolah. Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi hanya sedikit. Untuk mewujudkan kebijakan Kepala Desa masyarakatnya harus mempunyai pengetahuan yang lebih misalnya, pengetahuan tentang mengelola Desa tersebut.

Menurut Nopita Sari selaku Kepala Urusan TU dan Umum Desa Biha mengatakan bahwa batas wilayah Desa Biha sebagai berikut⁷⁰ :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Setia
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way Jambu
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulok Manik dan Paku Negara

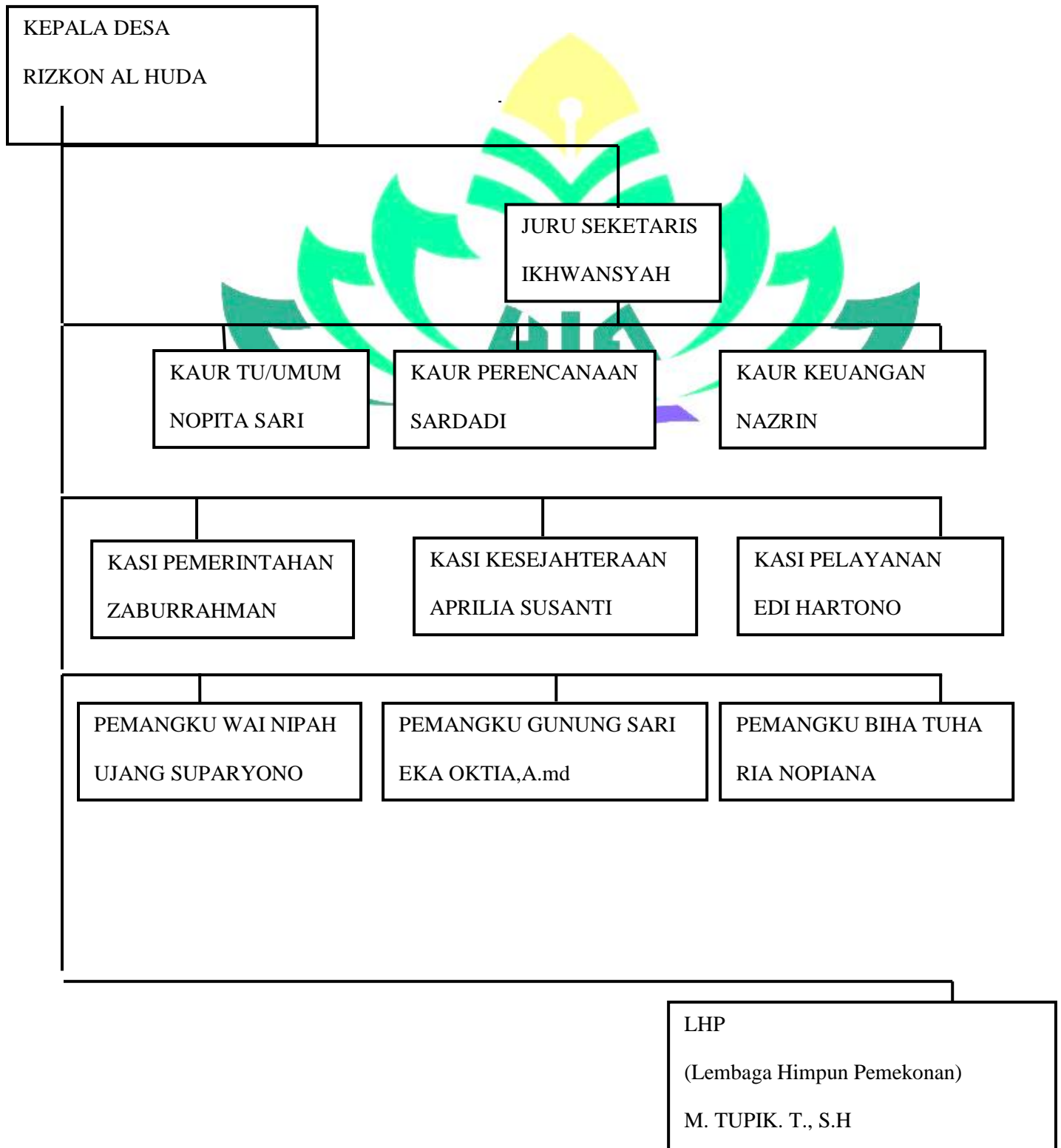
2. Tata Kelola Desa Biha

Menurut Ikhwansyah selaku Juru Tulis Desa Biha mengatakan bahwa “Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Biha adalah berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 pasal 1 angka (6) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa”.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Nopita Sari selaku Kepala Urusan TU dan Umum Desa Biha, Tanggal 7 Mei 2018, jam 11.00 WIB, di Kantor Desa Biha.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ikhwansyah *Op.Cit.*

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA BIHA
KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR
BARAT PROPINSI LAMPUNG



Penjelasan fungsi dan tugas pada struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Biha sebagai berikut :

a. Sekretaris Desa

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

Ayat (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan pengeluaran, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeeluan, verifikasi

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.⁷²

b. Kepala Urusan (Kaur)

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

Ayat (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan akspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyiapan

⁷²*Ibid*

rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir dat-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Seksi

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

Ayat (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :

a) Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata kerja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesejahteraan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi

masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.⁷³

d. Kepala Pemangku

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

Ayat (1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi :

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Aprilia Susanti selaku Kasi Kesejahteraan Desa Biha, Tanggal 7 Mei 2018, jam 11.30 WIB, di Kantor Desa Biha.

c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁷⁴

e. LHP (Lembaga Himpunan Pemekonan)

Menurut Kepala Desa bahwa LHP mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan tugas LHP adalah sebagai berikut :

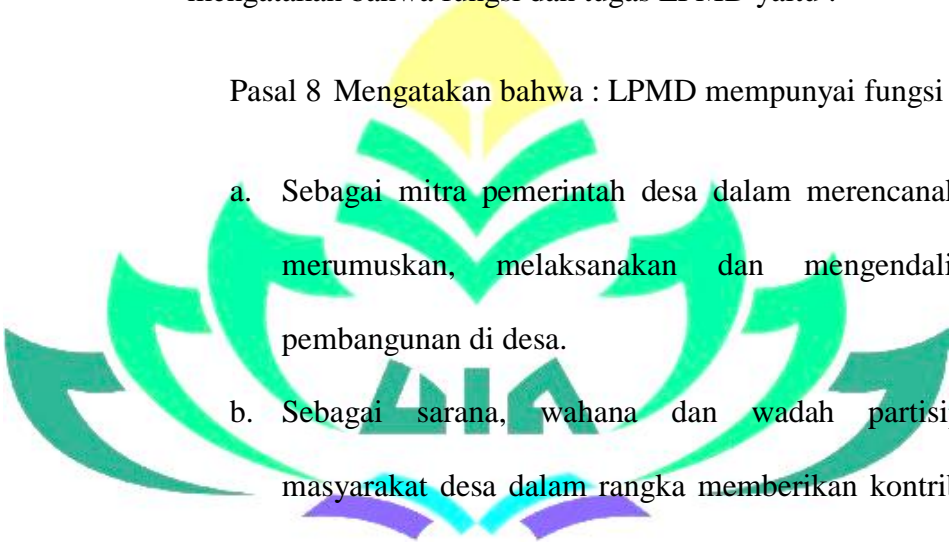
- 1) Membahas rancangan peraturan Desa bersama Peratin.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana peraturan Desa dan peraturan Peratin.
- 3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Peratin.
- 4) Membentuk panitia pemilihan peratin.
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Eka Oktia selaku Pemangku Desa Biha, Tanggal 7 Mei 2018, jam 12.00 WIB, di Kantor Desa Biha.

6) LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

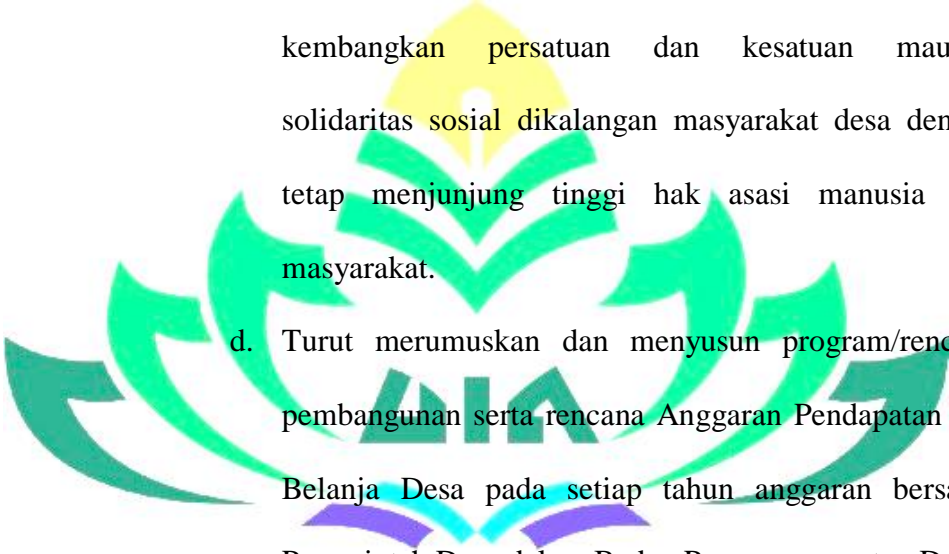
Dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan bahwa fungsi dan tugas LPMD yaitu :

Pasal 8 Mengatakan bahwa : LPMD mempunyai fungsi :

- 
- a. Sebagai mitra pemerintah desa dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di desa.
 - b. Sebagai sarana, wahana dan wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran objektif kepada pemerintah desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Sebagai motor penggerak swadaya gotong-royong masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 9 Mengatakan bahwa : LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai tugas :

- a. Mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Desa 1945.

- 
- b. Menjaga, memelihara, memupuk dan mengembangkan serta mengayomi adat istiadat, kultur budaya dan norma agama yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
 - c. Menjaga, memelihara, memupuk serta menumbuhkan kembangkan persatuan dan kesatuan maupun solidaritas sosial dikalangan masyarakat desa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan masyarakat.
 - d. Turut merumuskan dan menyusun program/rencana pembangunan serta rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahun anggaran bersama Pemerintah Desa dalam Badan Permusyawaratan Desa.
 - e. Menggali, memanfaatkan dan mendayagunakan potensi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Buatan untuk digunakan bagi kepentingan Desa dan masyarakat.⁷⁵

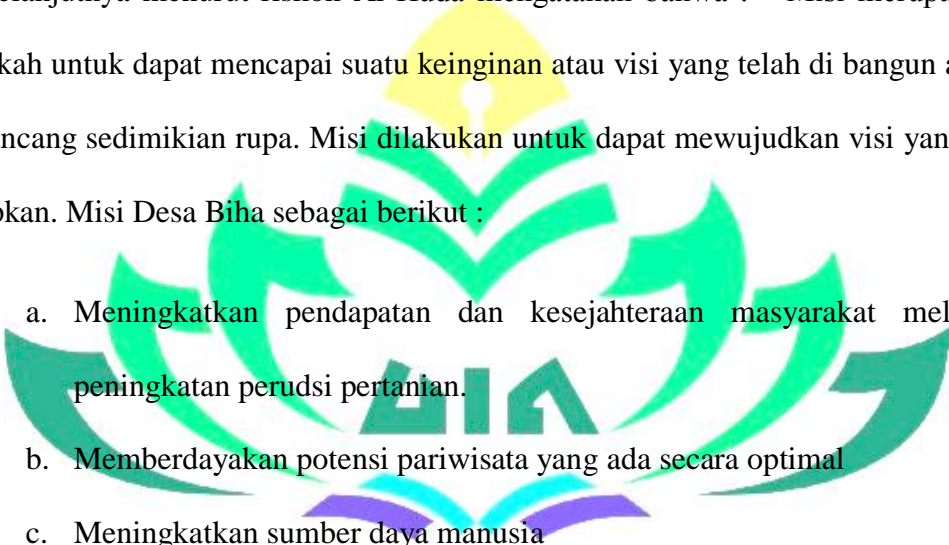
3. Visi dan Misi Desa Biha

Menurut Riskon Al-Huda selaku Kepala Desa Biha mengatakan bahwa “visi merupakan sebuah perspektif mendalam untuk masa mendatang mengenai Desa dan hal ini yang mesti di laksanakan agar tujuan itu tercapai. Visi Desa Biha adalah terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia dan meningkatkan

⁷⁵Wawancara dengan Bapak M.Tupik.T.selaku Ketua LHP Desa Biha, Tanggal 7 Mei 2018, jam 12.30 WIB, di Kantor Desa Biha.

kesejahteraan dengan menguatkan sector pertanian, perkebunan, insprastruktur, dan pariwisata serta kebersamaan dalam membangun demi Desa Biha yang lebih maju.”.

Selanjutnya menurut riskon Al-Huda mengatakan bahwa : ” Misi merupakan langkah untuk dapat mencapai suatu keinginan atau visi yang telah di bangun atau di rancang sedimikian rupa. Misi dilakukan untuk dapat mewujudkan visi yang di tetapkan. Misi Desa Biha sebagai berikut :

- 
- a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perudsi pertanian.
 - b. Memberdayakan potensi pariwisata yang ada secara optimal
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia
 - d. Mendorong kemandirian⁷⁶

B. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil. Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.

Secara eksplisit pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu :
Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Rizkon Al Huda selaku Kepala Desa Biha, Tanggal 7 Mei 2018, jam 9.00 WIB, di Kantor Desa Biha.

melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan.

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata kerja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁷⁷

⁷⁷*Ibid*

C. Kedudukan dan Peran LPMD Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa

Kedudukan LPMD dalam suatu Desa merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal sebagai mitra pemerintah desa dan secara organisatoris berdiri mandiri, dan LPMD melaksanakan tugasnya yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sebagai kekeluargaan dan gotong-royong serta tidak mencampuri urusan politik dan atau tidak bernaung terhadap salah satu partai politik dan organisasi masa.⁷⁸

Landasan hukum dari peran LPMD dalam menggerakkan kebijakan kepala desa dalam pembangunan desa yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu pada pasal 94, yang menyebutkan :

1. Desa memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada (rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa).
2. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.

⁷⁸*Ibid*

3. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta melaksanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan LPMD⁷⁹ (a) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan; (b) menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan pancasila; (c) menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun; (d) sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri; (e) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat; (f) membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; (g) membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; (h) pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan.

Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Adanya wadah yang baik guna meningkatkan pembangunan desa sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan juga dukungan dari pemerintah desa untuk menerima aspirasi

⁷⁹*Ibid*

masyarakat akan mempermudah merencanakan dan melaksanakan pembangunan menanam pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan pancasila adalah sebagai dasar desa dalam pembangunan. Adanya pemahaman yang baik dan penghayatan pancasila menjadikan pembangunan mempunyai arah dan tujuan. Karena desa tidak mungkin lepas dari NKRI sebagai negara kesatuan dan pembangunan yang berkesinambungan.

Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun adalah mengetahui potensi LPMD, sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, namun tidak sertamerta mereka menjadi petani, masyarakat desa dapat meningkatkan penghasilannya dengan adanya LPMD yaitu mengenali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong. Contohnya petani dengan beternak ayam atau sapi.

Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri, adanya jembatan penghubung antara pemerinth dan masyarakat desa menjadikan tolak ukur keberhasilan dari pembangunan desa, karena tidak adanya kerjasama antara kedua belah pihak maka sulit rasanya pembangunan akan dapat terlaksana. LPMD sebagai wadah atau perwakilan dari raknyat di desa.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat adanya LPMD di desa dapat menjadi sarana pengetahuan dan meningkatkan keterampilan di masyarakat, hal ini tidak lepas dari partisipasi pengurus LPMD sendiri. Jika

masyarakat LPMD diikutkan andil dalam pembangunan desa. Namun akan berlaku sebaliknya jika hanya orang tertentu maka tidak mungkin pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik pada masyarakat.

Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan yang harus dilakukan LPMD dan pemerintah desa adalah menggerakkan potensi pemuda setempat sebagai generasi yang akan datang. Karena dengan pemuda LPMD yang ikut langsung dapat meningkatkan pembangunan desa. Banyak dukungan dan kesepakatan yang diberikan dapat membuat pemuda lebih kreatif dan inovatif. Namun hal ini tidak boleh lepas dari pengawasan dan motivasi pemerintah.

Adanya membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan dapat dilaksanakan dengan cara kerjasama antar lembaga yang terkoordinasi dan terkoordinir sesuai dengan visi dan misi desa. Semakin banyak bantuan antar lembaga yang terkoordinir dengan baik maka program pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan, dengan cara memberikan penyuluhan dan pengetahuan terbaru tentang perkembangan LPMD dan pemerintah, sehingga dapat memberikan informasi dan kebijakan yang terbaru. Adanya dukungan dari semua warga dan pemerintah desa dapat

meningkatkan ketahanan yang mapan. Dan juga bisa dengan melakukan kebijakan-kebijakan lain yang menunjang pembangunan.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Riskon Al-Huda dalam pelaksanaan program LPMD dalam hal pembangunan mempunyai kendala-kendala dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk diadakan pembinaan dan gotong royong.
2. Sarana dan prasarana desa yang tidak memadai.
3. Cuaca dan kondisialam⁸⁰

Menurut Zaburrahman selaku kasi pemerintahan mengatakan bahwa ada faktor pendukung dalam pelaksanaan program LPMD dalam pembangunan yaitu “lembaga-lembaga desa yang berperan aktif membantu pemerintahan desa dalam menggerakkan program pembangunan desa dan kebersamaan masyarakat”.⁸¹

Menurut Faisal Nur selaku warga desa mengatakan bahwa “Ketua LPMD kurang dalam berkomunikasi dengan warga masyarakat, seperti

⁸⁰*Ibid*

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Zaburrahman selaku Kasi Pemerintahan Desa Biha, Tanggal 8 Mei 2018, jam 9.00 WIB, di Kantor Desa Biha.

salah satunya adalah pembangunan yang difatokkan pada satu dusun, hal ini sangat disayangkan oleh warga masyarakat”.⁸²

Menurut Obet meyonda selaku Operator Pekon mengatakan bahwa “Ketua LPMD sangat jarang hadir di kantor kedesaan. Yang berperan aktif setiap hari di kantor kedesaan hanyalah Kepala Desa dan Juru Tulis”.⁸³

E. Program LPMD dalam Pembangunan Desa Biha

Menurut Rizkon Al Huda mengatakan bahwa “Program Desa dalam pelaksanaan pembangunan diawali dengan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan”. Dari penggalian gagasan tersebut diketahui permasalahan di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari program-program pembangunan desa guna mencapai visi.

Kegiatan Desa Biha adalah sebagai berikut :

1. Gedung Pertemuan
2. Drainase
3. Rabat Beton

⁸² Wawancara dengan Bapak Faisal Nur selaku Warga Desa Biha, Tanggal 8 Mei 2018, jam 15.00 WIB, di Rumah.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Obet Meyonda selaku Operator Desa Biha, Tanggal 7 Mei 2018, jam 13.00 WIB, di Kantor Desa Biha.

4. Pembukaan Badan Jalan
5. Pembuatan Saluran Limbah
6. Pembuatan TPA 2 Unit
7. Abrasi Pantai
8. Gedung PAUD⁸⁴

Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan, LPMD sebagai pelaksana pembangunan, sinergi dengan masyarakat dan bawahan.

1. Pembangunan Yang Dilaksanakan

Menurut Rizkon Al Huda yang sudah dilaksanakan program pembangunan Desa sebagai berikut :

- a) Drainase
- b) Rabat Beton
- c) Pembuatan TPA 2 Unit
- d) Gedung PAUD
- e) Abrasi Pantai⁸⁵

2. Pembangunan Yang Belum Dilaksanakan

Menurut Sardadi mengatakan bahwa program yang belum terealisasi adalah :

- a) Gedung Pertemuan
- b) Pembukaan Badan Jalan

⁸⁴*Op Cit*, Rizkon Al Huda

⁸⁵*Ibid*

c) Pembuatan Saluran Limbah⁸⁶

Menurut Nazrin selaku Kaur Keuangan mengatakan bahwa “ Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan seorang Pembisnis, jadi sangat jarang untuk berkumpul dengan Aparatur Desa lainnya ataupun berada di Kantor Desa.”⁸⁷



⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Sardadi selaku Kaur Perencanaan Desa Biha, Tanggal 8 Mei 2018, jam 10.30 WIB, di Kantor Desa Biha.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Nazrin selaku Kaur Keuangan Desa Biha, Tanggal 9 Mei 2018, jam 11.00 WIB, di Kantor Desa Biha.

BAB IV

ANALISIS

A. Peran LPMD dalam menggerakkan Kebijakan Kepala Desa

Menurut Fairchild mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktifitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

LPMD merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, menampung dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Atas tanggungjawab itu LPMD mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman lembaga kemasyarakatan desa sebagai berikut :

Tugas LPMD menurut Pasal 8 : (a) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif (b) Menegakkan swadaya dan gotong royong masyarakat (c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Fungsi LPMD menurut Pasal 9 : (a) menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan (b) penanaman dan pemupukan rasa

persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat negara kesatuan republik indonesia (c) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat (d) penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif (e) penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, dan (f) penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian di harapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh mereka.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksud agar hasil pembangunan dan program-program pemerintah lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Program LPMD dalam pembangunan sarana fisik di Desa Biha adalah sebagai berikut : (1) membangun gedung pertemuan (2) drainase (3) rabat beton (4) pembukaan badan jalan (5) pembuatan saluran limbah keluarga (6) pembuatan TPA 2 unit (7) Abrasi pantai (8) gedung PAUD.

Program yang sudah dilaksanakan drainase, rabat beton, pembuatan TPA 2 unit, pembuatan abrasi pantai, dan pembuatan gedung PAUD. Sedangkan program yang belum terealisasi yaitu gedung pertemuan, pembukaan badan jalan, dan pembuatan saluran limbah.

Ketua LPMD dalam melaksanakan program pembangunan belum berperan sepenuhnya karena masih kurangnya komunikasi dengan warga masyarakat dan jarang hadir di kantor kedesaan. Program pembangunan Desa merupakan Kebijakan Kepala Desa dan sebagai pelaksana pembangunan merupakan salah satu tugas LPMD

Secara umum program pembangunan sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun masih ada yang belum terealisasi, dikarenakan masih ada pekerjaan yang meliputi pembangunan Desa Biha belum semuanya terselesaikan dengan baik, seperti pembangunan TPA dan pembangunan gedung PAUD, pembangunan baru terselesaikan 75% karena adanya rencana pembangunan gedung pertemuan sebagai tempat perkumpulan dengan warga masyarakat dan pembuatan saluran limbah.

Dalam suatu program pembangunan Desa, masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembangunan dan harus ditumbuhkan rasa kesadaran

masyarakat bahwa pembaangunan yang diprogramkan/dilaksanakan merupakan kebutuhan dan pembangunan desa merupakan suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yaang disertai meningkatnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari penguasaan tersebut.dan masyarakat mampu memahami bahwa pembangunan Desa itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Seorang Kepala Desa harus mampu menjadi motivator dan harus mampu berkomunikasi dan memotifasi semua elemen masyarakat baik pemuda, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan semua tokoh masyarakat guna mengerahkan semua potensi membangun desa.

Kepala Desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sebagai jajaran pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mampu membangun dan memelihara hubungan harmonis dengan masyarakat agar terwujudnya program pembangunan dalam membangun Desa yang lebih baik, Serta harus memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selalu melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan Desa.

LPMD harus membangun komunikasi dan memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan tujuan agar setiap orang dalam masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses dan kegiatan pembangunan Desa, lebih banyak anggota

masyarakat yang berpartisipasi aktif, lebih banyak cita-cita yang dimiliki masyarakat dan proses yang melibatkan masyarakat pun dapat terealisasi.

Komunikasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di Desa Biha sudah menjalin hubungan dengan baik, ini dapat dilihat dari setiap dukungan yang dilakukan oleh lembaga terkait Kepala Desa terhadap kegiatan yang dilakukan dalam bidang pembangunan, dengan bersama-sama sejalan dengan tujuan awal yaitu bagaimana membangun Desa Biha agar lebih maju lagi.

Upaya-upaya tersebut menurut penulis berupa pengendalian penggerak kebijakan kepala desa yang diberikan kepada LPMD akan berjalan dengan baik, maksimal dan berjalan dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Peraturan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam dasar hukum LPMD peran lembaga tersebut di desa yang penulis teliti masih belum maksimal menjalankan perannya di dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Para anggota/pengurus LPMD jarang berdialog dengan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat mereka ketahui.

Pembangunan desa akan dikatakan baik jika sebuah pembangunan yang dilaksanakan telah melewati proses desain yang sangat matang dari setiap lapisan masyarakat yang ada di desa. Maka partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap pembangunan di desa untuk mewujudkan sebuah pembangunan

yang mampu menjawab permasalahan yang dirasakan sangatlah dibutuhkan agar anggaran yang diturunkan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Pengurus LPMD yang diharapkan sebagai lembaga penggerak roda pembangunan yang mampu meningkatkan semangat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, selain peranan LPMD mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di desa, pengurus LPMD juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya, yakni mampu mensosialisasikan program-program kerja pemerintah desa yang telah disetujui bersama.

Tingkat partisipasi masyarakat merupakan akar keberhasilan sebuah pembangunan di desa karena ketika masyarakat diberikan ruang dan terlibat dalam menentukan arah pembangunan otomatis yang tergambar dipermukaan saat perencanaan dilakukan adalah kendala atau permasalahan masyarakat terkait dengan kebutuhannya.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menggerakkan Kebijakan Kepala Desa

Pada dasarnya peran LPMD dalam menggerakkan Kebijakan Kepala Desa ialah melaksanakan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di perdesaan dan meliputi seluruh

aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya gotong royong.⁸⁸

Pembangunan Desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dengan mendapat bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.⁸⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat, dengan demikian rakyat pulalah yang harus melaksanakan dan memelihara hasilnya serta meneruskan langkah pembangunan selanjutnya.

Al-Madudi mengatakan *khalifah* merupakan pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rasul. Gelar *khalifah* pertama kali digunakan oleh abu bakar kemudian umar bin khattob dengan gelar : *khalifah-khalifah* rasulullah : tetapi dia tidak menggunakan gelar ini, ia menyebut dirinya sebagai *amir al-mu'minin* (pemimpin para umat-umat mukmin. Usman bin affan dan ali bin abi thalib juga digelari gelar *khalifah* rasul. Keempat khalifah ini lebih populer dengan sebutan *khulafaur rasyidin* (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk). Ada yang menyebutnya : *the pious caliph*” khalifah yang amat setia dan taat pada agama, dan shaleh”.⁹⁰

Kepemimpinan dalam Islam merupakan *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta alam) di dalam ajarannya berisikan tentang banyak hal, masalah

⁸⁸ Syamsir salam & Amir Fadhilah, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 48.

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ R.A.Nicholson, *a library history of the arabs*, (cambritg universiti pers, 1969), h. 181.

pembangunan dan kesejahteraan merupakan masalah yang sangat penting karena dengannya kehidupan akan berjalan dengan baik. Manusia di muka bumi ini yang berkedudukan sebagai *khalifah* mempunyai amanat dari *rabbnya* untuk senantiasa menjalankan kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ



Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. al Jamu’ah:10)

Pada dasarnya, yang berkaitan dengan rutinitas kepemimpinan dalam Islam adalah kebiasaan pokok dalam kepemimpinan yang merupakan tanggung jawab. Seluruhnya orang yang hidup dimuka bumi ini dinamakan sebagai pemimpin.

Pembahasan sebelumnya peran LPMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belumlah berperan sepenuhnya, karena masih kurangnya komunikasi dengan warga masyarakat dan jarangnya hadir di kantor kedesaan. Seorang ketua lembaga merupakan pemimpin dari lembaga yang diamanatkan pada dirinya.

Dalam karakteristik kepemimpinan ketua lembaga tidak memenuhi karakter seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus mempunyai karakteristik yaitu : (1) visioner, pemimpin harus mempunyai visi atau pemahaman yang jelas tentang mau dibawa kemana organisasinya dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapainya. (2) penuh semangat, seorang pemimpin yang baik harus membawa energi yang besar bagi bawahannya dan selalu mempunyai semangat yang senantiasa dikobarkan dalam setiap tugas yang diberikan. (3) inspiratif, tugas utama seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi pada orang untuk bekerja mewujudkan hal-hal hebat dengan sumber daya yang terbatas. (4) inovatif, dalam memimpin organisasinya, pemimpin dituntut untuk memiliki sikap yang inovatif. Dengan memiliki visi dan misi yang senantiasa menawarkan ide-ide segar yang membawa perubahan dan pembaharuan.

Peran ketua kelembagaan dilihat dari pandangan Islam tidaklah memenuhi ciri-ciri seorang pemimpin, yaitu : menjalankan amanah, Allah

SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal : 27)⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mengawasi Kebijakan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Peran LPMD di Desa Biha dalam melaksanakan program Pembangunan Desa belum berperan sepenuhnya, karena kurangnya komunikasi dengan warga masyarakat dalam mensosialisasikan pembangunan dan kurangnya komunikasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di Desa Biha karena jarang hadir di Kantor Kedesraan dan kurang tertarik dalam melihat potensi yang ada dalam masyarakat dan desa.

Adapun yang menjadi penghambat pelaksanaan program Pembangunan Desa Biha yaitu sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk diadakan pembinaan, sarana dan prasarana Desa tidak memadai, serta faktor cuaca alam.

2. pandangan Islam terhadap peran LPMD dalam hal kepemimpinannya untuk pembangunan desa tidak memenuhi ciri-ciri kepemimpinan, karena ketua LPMD merupakan pemimpin dari organisasinya. Seorang pemimpin harus mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yaitu (1) Menjalankan amanah; (2) Memutuskan perkara dengan adil; (3) Mencintai bawahan; (4) Lemah lembut dan bersikap tegas.

B. Saran

Demi meningkatkan pembangunan di Desa Biha dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepala Desa mampu mempertahankan visi, tanggung jawab, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik.
2. LPMD dalam bekerjasama dengan masyarakat harus ditingkatkan lagi dimana LPMD dan juga Kepala Desa harus aktif dalam memberikan informasi-informasi penting dan melakukan komunikasi yang baik agar hubungan kerjasama dapat terjaga dengan baik.
3. Sebaiknya Kepala Desa dan LPMD dapat menyesuaikan waktu ketika harus memberikan bimbingan, pengarahan dan kerjasama karena pekerjaan masyarakat yang berbeda-beda, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara menyeluruh sehingga tercipta hubungan.
4. Masyarakat diharapkan untuk kedepannya untuk mempunyai hubungan yang baik pula dalam bekerjasama dengan aparatur desa dalam hal gotong royong agar program-program desa terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Farra Abu Yala. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Beirut : Dar Al-Kutub Al Fikr,1994.
- Al- Mawardi imam. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al- Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Darul Falah,1973.
- Al- Salus, Ali. *Imamah Dan Khalifah*. Jakarta : Gema Insan Pers,1997.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung : Sinar Baru, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* (cet.11). Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Ashshofa, Burhan. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka,1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (cet. 4). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djaenuri Aries, Aisyah Siti, Enceng. *Sistem Pemerintahan Desa*. Tangrang selatan : Universitas terbuka,2014.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Suatu Rambu Rambu Syari'ah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2003.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif:Analisis Data*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2010.
- Et,al.Veithzal. *pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta : Raja Pers,2013.
- Fatimah, Siti. *Managemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya Dalam Organisasi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta,2015.
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya : PT.Bina Ilmu,1984.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Dalam Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet.1). Jakarta: Predanamedia Group, 2014.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,1992.

Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PPM, 2014.

M, Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.

Monteito, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016.

Nakula Dhahir Ma'luf Bin Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah wa Al-a'la*. Beirut : Dar Al-Machreq Sarl Publishers, 2000.

Qurthubi Al. *Tafsir Al-Qurthubi. Penerjemah Fathurrahman Dkk. Dari Al-jami'Li Ahkam Al-Qur'an*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.

Rahman, Taufiqi. *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Salam Syamsir dan Fadhilah Amir. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta : Lembaga Penelitian Uin syarif Hidayatullah, 2008.

Sjadjali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

Soekarno, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Soeratno, *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 1995.

Susiadi AS. *Metodelogi Penelitian*. Lampung : LP2M IAIN Raden Inta Lampung, 2015.

Syarif Ibnu Mular, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Erlangga, 2008.

Taimiyah Ibnu. *Minhaju Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*, Baulaq, Jilid 1.

Taimiyah Ibnu. *Al-Siyasah Al-syariyah Etika Politik Islam. Terjemah Rofi' Munawwar. Dari Al-Siyasah Al- Syari'iyah Fi Islahi al-Ra'iyah*. Surabaya : Risalah Gusti, 2005.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1999.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat?
2. Bagaimana Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat?
3. Adakah Panduan Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat?
4. Adakah Peraturan Daerah yang Mengatur Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat?
5. Apa Saja Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat?
6. Adakah Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang belum dilaksanakan?
7. Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam membantu Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat? ?
8. Adakah Faktor Pendukung dan Penghambat dalam melaksanakan program kerja lembaga pemberdayaan Masyarakat?
9. Apakah Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Keinginan Masyarakat?
10. Apa Saja Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang sudah Terlaksana?